

MASYUMI DALAM KONTESTASI POLITIK ORDE LAMA

Abdul Rahman

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P Pettarani, Kampus Gunungsari Timur, Makassar
Email: rahmanparahyangan83@gmail.com

Abstrak - Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 sebagai pengganti MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia) karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern, sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII). Selain itu Jepang juga berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh maupun tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera (Pusat Tenaga Rakyat), akhirnya Jepang mendirikan Masyumi. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada tahun 1947.

Kata Kunci: Masyumi, Politik, Orde Lama

Abstract - Masyumi was originally established on October 24, 1943 as a substitute for MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia) because Japan needed a body to mobilize the support of Indonesian society through Islamic religious institutions. Nonetheless, the Japanese were not particularly interested in the Islamic parties that existed in the Dutch era, mostly located in urban and modern-day thinking, so that in the first weeks, Japan had banned the Indonesian Sarekat Islam Party (PSII) and the Islamic Party of Indonesia (PSY) PII). In addition, Japan is also trying to separate the Islamic intellectuals in urban areas with the rural kyai. The rural kyai play a more important role for the Japanese because it can mobilize the people to support the Pacific War, as laborers and soldiers. After failing to gain nationalist support within the Putera (People's Power Center), the Japanese finally established Masyumi. Masyumi at the time of the occupation of Japan has not been a party but is a federation of four Islamic organizations that were allowed at that time, namely Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Unity of Moslems, and Indonesian Islamic Unity. After becoming a party, Masyumi founded the daily newspaper Abadi in 1947.

Keyword: Masyumi, Politic, Old Order

PENDAHULUAN

Dalam sejarah proses pembangunan politik di Indonesia, salah satu partai politik yang berperan besar dalam proses pengukuhan identitas Islam di panggung politik Indonesia adalah partai Islam Masyumi. Selama keberadaannya di Indonesia, Masyumi merupakan partai yang pernah terlibat dalam pemerintahan. Karena kedudukan itu Masyumi turut menyertai asas politik Indonesia sekurang-kurangnya sampai tahun 1960.

Melalui Kongres yang pertamanya di Yogyakarta pada 7-8 November 1945, Masyumi mendeklarasikan diri sebagai partai Politik dan

bukan lagi organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Partai ini dalam perkembangannya menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Partai yang dapat menyaingi partai besar lainnya yang basis dasarnya berideologi Nasionalis (PNI), Komunis (PKI). Partai Masyumi dapat menghimpun berbagai organisasi Islam yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi-organisasi itu diantaranya turut bergabung juga NU (Nadhatul Ulama), Muhammadiyah, Perti, PSII dan lain sebagainya. Berbagai organisasi Islam yang turut menggabungkan diri bersama masyumi maka

semakin mewarnai percaturan politik yang ada di Indonesia

Masyumi memandang keterlibatannya secara langsung dalam kekuasaan negara sebagai suatu jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Melalui cara demikian-menurut Natsir sebagai salah satu tokoh Masyumi pada waktu itu, Islam bukan semata-mata religi, yaitu agama dalam pengertian ruhaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dan ALLAH, dan antara sesama manusia, Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan antara agama dari politik. Oleh sebab itu, dalam masa revolusi umat Islam di Indonesia bukan saja dijiwai oleh aspirasi nasional, melainkan juga oleh aspirasi Islam. (Natsir. 1951).

Berdasarkan pandangan ini, Islam harus dijadikan asas dalam ideologi negara. Sayangnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno menjelang Demokrasi Terpimpin dikukuhkan, partai politik Islam seperti Masyumi dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat menjadi ancaman dan harus dicurigai, karena alasan ini Presiden Soekarno selalu berusaha untuk melemahkan dan meminggirkan peranan Masyumi. Disamping Masyumi juga dianggap akan menghalangi proses pembangunan politik di Indonesia.

Dalam perjalanannya Masyumi sebagai partai politik banyak mengalami dinamika sampai bubarnya partai ini pada tahun 1960. Baik dari hubungan internal sendiri, maupun hubungan dengan partai lain dengan Presiden Soekarno. Hubungan Masyumi pernah mengalami hubungan yang harmonis dengan Presiden Soekarno, terutama pada masa revolusi. Namun lambat laun karena berbagai perbedaan dan tujuan arah dari kedua belah pihak, hubungan itu justru menimbulkan pergeseran hingga menjurus kepada konflik.

Di sisi lain, para pemimpin partai politik Islam Masyumi memandang negara dengan penuh curiga. Kecurigaan itu bersumber dari asas ideologi dan kerangka kelembagaan yang berbeda antara partai Islam dan negara yang memperjuangkan ideologi Pancasila. Dapatlah kita lihat disini ada sebuah persimpangan politik antara beberapa kelompok yang memperjuangkan Ideologi Pancasila dan beberapa kelompok yang menginginkan Ideologi Islam yang berlangsung disebuah negara yang sebahagian besar penduduknya beragam Islam. Dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas maka tulisan ini ingin megkatkan topik terkait persimpangan politik Partai Masyumi dalam pemerintahan di Indonesia dari tahun 1945-1960.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam

melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as written*). Dalam ruang lingkup Ilmu Sejarah, metode penelitian itu disebut metode sejarah. Metode sejarah digunakan sebagai metode penelitian, pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan (5 W dan 1 H) yang merupakan elemen dasar penulisan sejarah, yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Pertanyaan-pertanyaan itu konkretnya adalah: Apa (peristiwa apa) yang terjadi? Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Dalam proses penulisan sejarah sebagai kisah, pertanyaan-pertanyaan dasar itu dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang perlu diungkap dan dibahas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi sasaran penelitian sejarah, karena penulisan sejarah dituntut untuk menghasilkan eksplanasi (kejelasan) mengenai signifikansi (arti penting) dan makna peristiwa.

PEMBAHASAN

a. Terbentuknya Partai Masyumi

Dalam sejarahnya, sebelum Masyumi menjadi partai politik di Indonesia. Dahulunya merupakan sebuah perkumpulan organisasi Islam pada masa pendudukan Jepang atas Indonesia. Dalam sebuah pertemuan, Balatentara Djepang mengizinkan Ulama, pada 4 September 1942, menghidupkan kembali Madjlis Islam A'la Indonesia-MIAI yang pernah didirikan pada 15 Rajab 1356-21 Septemberr 1937, dengan W.Wondoamiseno sebagai ketuanya (Suryanegara, 2010: 38) yang pada waktu anggotanya terdiri dari organisasi Perserikatan Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama), Persatuan Islam, dan Al-Irsyad serta organisasi pendukung lainnya. Lalu kemudian suasana setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia muncul pada tanggal 3 November 1945 untuk anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik. Dengan demikian ada suatu kesempatan bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi dan perjuangannya untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terkhusus demi perjuangan kepentingan umat Islam.

Oleh sebab itu, umat Islam merasa berkewajiban mengorganisasikan kekuatan dan tenaganya dalam satu wadah politik sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam bidang politik. Maka diadakanlah Mukatamar Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7 dan 8 Novermber 1945 yang dihadiri oleh hampir semua tokoh berbagai organsasi Islam dari masa sebelum

perang serta pendudukan Jepang. Kongres memutuskan untuk memutuskan untuk mendirikan Majelis Syuro pusat bagi ummat Islam Indonesia (Noer, 2000: 10). Setelah menjadi Partai Masyumi, Masyumi menidirikan surat kabar Harian Abadi pada 1947. Tentunya berdirinya surat kabar ini lebih mempermudah dalam memperluas anggota dan mengabarkan berbagai informasi terkait perkembangan politik di Indonesia saat itu. Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi. Tokoh NU, K.H Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pemimpin tertinggi Masyumi pada saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengeruan Masyumi dan karenanya keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari.

Dalam hal pembentukan Masyumi bulan Novermber 1945 perlu dicatat lebih dahulu betapa hangat dan bersemangatnya sambutan yang diberikan oleh umumnya rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan. Dengan melepaskan semua perbedaan, baik yang bersifat pribadi maupun ideologi, seakan tiap orang memberi bantuan kepada kemerdekaan yang diproklamasikan, dan oleh sebab itu, turut serta membelanya dengan berbagai cara. (Noer, 2000: 47) Masyumi mempunyai dua macam anggota :1) perseorangan dan 2) Organisasi. Anggota perseorangan minimum berumur 18 tahun atau sudah kawin: ia tidak dibenarkan merangkap keanggotaan partai lain. Anggota Perseorangan mempunyai hak suara, sedangkan anggota Organisasi (disebut anggota istimewa) mempunyai hak untuk memberi saran atau nasihat. Ide dualisme anggota ini didasari pertimbangan untuk memperbanyak anggota. Sebab lain, agar Masyumi dapat dilihat sebagai wakil ummat tanpa ada yang merasa terwakili (Noer: 2000: 52). Dalam bagian selanjutnya kita bersama akan melihat bagaimana Masyumi membawa perubahan bagi perkembangan politik di Indonesia. Perkembangan yang akan membawa Masyumi mempunyai peranan penting pada masa revolusi dan pada masa Orde Lama justru berbalik seakan Masyumi mulai perlahan-lahan disisihkan dalam pemerintahan dan segera dilarang di Indonesia dengan berbagai polemik yang ada.

b. Masyumi Partai Pemersatu Umat.

Kedudukan Umat Islam secara politis tidak terlalu menggembarikan pada bulan-bulan pertama kemerdekaan Indonesia. Namun, Sejak didirikannya Masyumi sebagai Partai Islam di Indonesia tampaknya ini membawa perubahan yang besar terhadap rakyat Indonesia. Masyumi lahir sebagai wadah persatuan perjuangan umat Islam Indonesia. Umat Islam merupakan kalangan penduduk terbesar di Indonesia hal ini

membuktikan betapa semangatnya mereka memberikan respon positif terhadap partai Masyumi. Sekitar 90 % orang Indonesia menganut agam Islam. Memang tidak semuanya berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam seperti sholat dan puasa. Sejak Masumi mendeklarasikan diri sebagai partai politik berduyun-duyun rakyat Indonesia turut serta ikut bergabung dalam partai tersebut.

Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya berbagai organisasi Islam yang bersifat lokal. Pada mulanya yang bergabung adalah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam. Kemudian disusul Persatuan Islam di Bandung, Jami'ah Al-Wasliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara pada tahun 1948, Persatuan Ulama seluruh Aceh (PUSA) di Aceh pada tahun 1959, Al-Irsyad pada tahun 1950, Mathul Anwar di Banten dan Nahdatul Wathan di Lombok. Organisasi-organisasi itu bergabung dengan partai Masyumi sebagai anggota istimewa. Anggota istimewa Masyumi adalah anggota organisasi . Bergabungnya organisasi-organisasi itu memberikan andil dan besar dalam penambahan anggota Masyumi, dan memperluas pengaruhnya ke seluruh pelosok nusantara. Selain organisasi-organisasi itu, ada juga organisasi Islam yang meleburkan diri ke dalam Masyumi, Misalnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan di Medan pada akhir November 1945. Parmusi meleburkan diri ke Masyumi pada 6 Februari 1946. Sejak saat itu berdirilah Masyumi di Sumatera Timur. Langkah Parmusi ini juga diikuti oleh Majelis Tinggi yang berpusat di Bukit Tinggi. Begitu juga halnya dengan Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) di Kalimantan Selatan (Siregar, 2014: 21-22).

Fenomena munculnya Masyumi dalam demokrasi di Indonesia ini telah benar-benar menyedot suara banyak rakyat Indonesia. Masyumi juga mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia (STII) pada tanggal 26 Oktober 1946 di Yogyakarta. Pendirian STII dimaksudkan untuk merekrut anggota Masyumi dari kalangan petani. Selain STII, Masyumi juga mendirikan perserikatan untuk buruh yakni Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada tanggal 27 November 1947 di Solo. Masyumi juga mendirikan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII) pada tahun 1950. Partai politik Islam Indonesia, Masyumi merupakan partai terbesar. Masjumi memperoleh dukungan kekuatan militer dari Hizbullah, suatu organisasi bersenjata yang terdiri dari para pemuda Muslim yang taat, beusia antara 18-21 tahun. Selama hampir sepanjang tahun pertama berdirinya Republik ini, besarnya kekuatan militer ini mungkin mencapai 20.000 hingga 25.000 orang bersenjata yang terorganisir dalam satuan-satuan hizbullah. Hizbullah dibawah

kepemimpinan Masyumi dan dianggap sebagai cabang militernya (Kahin, 1995: 205). Strategi perjuangan terkoordinir dan terpusat, justru menjadi rahasia kemenangan partai Masyumi saat itu. Suara-suara umat Islam jika tidak diikat orientasi politiknya, dibiarkan liar, suara umat Islam dimanfaatkan oleh partai-partai sekuler. Ini berbahaya. Yang kemudian dalam perkembangannya menimbulkan konflik. Konflik yang berakibat pada bubarnya partai tersebut dan kegoncangan politik di Indonesia.

c. Ideologi

Partai Islam Masyumi yang sedang kita bicarakan ini menetapkan Islam sebagai dasar Partai, dan dalam cita-citanya ingin menegakkan ajaran Islam dalam masyarakat dan negara. Hal ini tidak perlu berarti suatu pertentangan dengan dasar serta ideologi lain seperti demokrasi, sosialisme, ataupun Pancasila, karena soalnya lebih terletak pada isi dasar dan ideologi yang diperbandingkan itu. Umpamanya dalam berbicara tentang demokrasi, kita bisa berkata bahwa prinsip musyawarah ditegaskan dalam Islam. Dalam hal sosialisme, pemberantasan kemiskinan dianjurkan pula oleh Islam, tetapi bila sosialisme itu berarti penghapusan hak milik pribadi, ia tidak dapat diterima oleh Islam. Begitu pula dalam hal Pancasila: Bila sila ketuhanan Yang Maha Esa sekadar dijadikan simbol saja, dan mempunyai kedudukan yang sama dalam sila-sila yang lain, banyak orang Islam tidak dapat menerimanya karena dalam ajaran Islam “segala sesuatu berasal dari ALLAH dan kepadanya-NYA pula segalanya kembali” (Noer, 2000: 125-126).

Dalam Masyumi semua ideologi tersebut sudah terdapat dalam penjabarannya terdapat di ajaran Islam. Oleh sebab itu ia ingin menggunakan Islam sebagai dasar Partai. Yang menjadi pijakan Partai terkait penentuan arah dan tujuan, serta garis besar haluan partai. Menurut Anggaran Dasar tahun 1945, Masyumi bertujuan “Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam” dan “Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.” (Pasal 11). Masa-masa tersebut memang lebih menuntut sikap menghancurkan (pihak penjajah). Di pihak lain seakan syiar dan rumusan singkat tersebut dianggap telah dapat dipahami. Hal ini tercermin juga dalam uraian Sukiman, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Masyumi setelah berdirinya. Katanya :“ *pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, dari kalangan umat Islam terdengar suara gemuruh menuntu supaya Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Tuntutan itu mewujudkan cita-cita umat Islam, sebagaimana kaum sosialis menghendaki Indonesia menjadi Sosialis, atau golongan lainnya mengharapakan susunan negara menurut*

cita-citanya. Nyatalah bahwa Negara sebagai alat pengatur kehidupan di dunia ini menjadi barang keinginan dan hendak yang dimiliki oleh beberapa kalangan dalam masyarakat. Memang barang siapa menguasai negara dan alat perabotannya, dialah yang dapat melaksanakan cita-citanya dalam kehidupan di dunia dan akhirat.” (Noer: 2000: 125-126).

Pada umumnya, partai bermaksud “melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan, hingga dapat mewujudkan susunan negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan masyarakat yang berdasar keadilan menurut ajaran-ajaran Islam. Ia juga bermaksud “memperkuat dan menyempurnakan dasar-dasar pada Undang-Undang Dasar RI, sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan negara Islam” suatu pemilihan umum dan langsung merupakan tuntutan partai. Tanggal 17 Desember 1945 Masjumi mengeluarkan suatu program aksi bahwa Islam “menghendaki kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang damai antara bangsa-bangsa di muka bumi ini,” dan “menentang kekejaman, kebuasan serta kepalsuan kapitalisme dan imperialisme. (Noer, 2000: 126).

d. Sukses Dalam Pemerintahan 1945-1949

Setelah kita memperhatikan mengenai berdirinya Partai Masyumi sebagai ideologi Islam dan partai pemersatu umat. Kini tibalah bagi kita untuk membahas Masyumi dalam pemerintahan di Indonesia. Tentu peranan Masyumi dalam pemerintahan kerap kali kita jumpai dinamika politik dalam pemerintahan. Maka baiklah kita akan bicarakan kedudukan dan peranan mereka pada masa revolusi, Orde lama dan akhirnya bubarlah partai tersebut. Pada masa revolusi kabinet pertama dilantik lebih tepatnya pada tanggal 14 November 1945 yang sering disebut sebagai kabinet Sjahrir. Ketika Sjahrir membentuk kabinet, partai Masyumi tidak diikut sertakan duduk dalam pemerintahan. Meskipun ada nama Rasyidi sebagai menteri negara, akan tetapi keberadaannya sebagai menteri atas nama pribadi, dan bukan mewakili partai Masyumi. Sekalipun demikian, terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 tidak lepas dari peran politik yang dijalankan Masyumi, dan yang menjadi menterinya adalah Rasyidi.

Pada masa itu posisi Masyumi adalah sebagai partai oposisi. Sehingga Masyumi bersikap kritis terhadap pemerintahan dan tidak jarang bertentangan dengan pemerintah, seperti dalam menyikapi permasalahan imperialis. Partai Masyumi tidak setuju dengan sikap pemerintah yang lebih mengedepankan perundingan dalam menghadapi Belanda. Sikap itulah yang akhirnya menyebabkan Sjahrir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946) terdapat kader-kader

Masyumi, seperti Arudji Kartawinata sebagai menteri muda pertahanan, M.Natsir sebagai menteri penerangan, Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai menteri muda keuangan, dan M.Rasyide sebagai menteri agama. Begitu pula dengan kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947) kader-kader Masyumi masih tetap menduduki beberapa jabatan menteri seperti Mr. Moh Roem sebagai menteri dalam negeri Harsono Tjokroaminoto sebagai menteri muda pertahanan, M.Natsir sebagai menteri keuangan, Yusuf Wibisono sebagai menteri muda kemakmuran, K.H. Faturrahman sebagai menteri Agama, dan K.H. Wahid Hasyim sebagai menteri agama. Meskipun banyak kadernya yang duduk dalam menteri. Masyumi masih mempertahankan sikap kritisnya terutama atas perjanjian Linggarjati. Masyumi menganggap bahwa hasil perjanjian tersebut banyak merugikan R.I, Masyumi menolak perjanjian tersebut yang akhirnya kabinet mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Sikap Kritisnya itu terus berlanjut pada masa kabinet Amir Sjafrudin I (3 Juli 1947-11 November 1947 dan II (11 November 1947-29 Januari 1948). Akhirnya kabinet itu mengembalikan mandatnya kepada Presiden karena banyak partai Masyumi yang menarik diri dari kabinet. Sikap itu diambil atas reaksi terhadap Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh perdana menteri Amir Sjafruddin Harahap.

Selanjutnya di lakukanlah kabinet Hatta. Sukarno menunjuk Hatta sebagai perdana Menteri. Pada masa kabinet Hatta beberapa kabinet Masyumi duduk kembali pada kabinet tersebut. Selama pemerintahan Hatta ini, ada tiga soal yang merupakan faktor penentu dalam perkembangan Indonesia umumnya, dan Masyumi khususnya. Yang pertama ialah soal munculnya Gerakan Darul Islam, kedua pemberontakan PKI di Madiun 1948, dan Ketiga peranan Masyumi atau tokoh-tokohnya dalam penyelesaian revolusi yaitu tercatat terutama dari masa aksi militer Belanda kedua sampai pada penyerahan kedaulatan. Aksi militer kedua pada penyerahan kedaulatan. Aksi militer Belanda itu dilancarkan pada 19 Desember 1948 dengan akibat semua kota penting di Jawa dan Sumatra dapat dikuasai Belanda, termasuk Yogyakarta dan Bukit tinggi. Yang menjadi perhatian oleh para tokoh Masyumi di masa revolusi dan dianggap cukup berhasil ialah dalam usaha Diplomasi, setelah senjata berkata tanpa kesudahan dan tanpa ketentuan, rupanya penyelesaian dapat dicari juga dengan berunding. Tepat pada 14 April 1949, kali ini dengan pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia yang menandai berakhirnya Agresi Militer Belanda tersebut.

Sementara untuk kasus Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo itu sangat menimbulkan perpecahan dalam tubuh Masyumi. Banyak

anggota Masyumi yang ikut dengan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam. Menyebabkan luka mendalam bagi partai. Sedangkan kasus Pemberontakan PKI di Madiun. Madiun dipilih sebagai basis pemberontakan karena sejak berdirinya Cabang Masyumi di Madiun,- Madiun pernah menjadi tempat Mukhtar Masyumi ketiga dari 27-31 Maret 1948,- Pengaruh politisi sayap kiri mulai bergeser. Padahal sebelumnya Madiun merupakan kantong komunis (Siregar, 2014: 45).

e. **Persimpangan Politik Antara Masyumi, Pki Dan Konsepsi Presiden**

Jika pada masa revolusi Masyumi lebih berperan penting dalam terwujudnya pemerintahan di Indonesia maka pada sekitar 1950an sampai 1960-an ini keadaan berbanding terbalik. Masyumi semakin disisihkan dalam peranannya di Indonesia. Ditunjukkan dari adanya beberapa perbedaan dan arah tujuan di antara kalangan politis pada waktu itu. Konflik politik yang berbasis perbedaan ideologi dan kekhawairan Presiden Sukarno atas Masyumi yang dianggapnya kepala batu yang dapat menghalangi “penyelesaian revolusi” merupakan latar dan puncak dari pembubaran partai Masyumi.

Presiden Soekarno mempunyai kekuasaan untuk menunjuk formatur kabinet, sebagaimana yang diatur dalam UUDS 1950. Presiden Sukarno menunjuk Ketua Masyumi M.Natsir sebagai formatur kabinet. Posisi formatur inilah yang kemudian mengantarkan M.Natsir sebagai perdana menteri pertama pada masa demokrasi parlementer. Perdana menteri Natsir mulai menjalankan pemerintahannya pada bulan September 1950 (Siregar, 2014: 57). Akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya ia mengalami kegagalan untuk menyelesaikan Irian Barat. Sukarno menghendaki untuk membatalkan persetujuan KMB secara unilateral, dan memberikan sanksi ekonomi kepada Belanda. Mengingat Sukarno pernah berpidato, “sebelum ayam berkokok dan matahari terbit 1 Januari 1951, Irian Barat harus sudah masuk ke pangkuan ibu pertiwi”. Itu ia gunakan untuk memanasakan situasi dengan isu Irian Barat. Saran ini disampaikan Presiden pada saat sidang kabinet di Istana negara. Usulan ini ditolak oleh perdana menteri Natsir. Dan setelah melakukan Voting dari 17 anggota kabinet, 5 suara mendukung Sukarno dan 12 suara mendukung Natsir dengan melalui jalur diplomasi. Sukarno sangat kecewa dan hal itu mulai menunjukkan memburuknya hubungan antara kedua tokoh tersebut dan berlanjut kepada periode-periode berikutnya.

Perseteruan antara Presiden dan Masyumi tetap terjadi pada saat Kabinet Sukiman. Seperti yang terjadi perbedaan pendapat antara

Sukarno yang tidak setuju tentang perdamaian dengan Jepang, dan penerimaan bantuan dari Amerika Serikat. Sebaliknya dengan Sukiman yang akan melakukan pembersihan terhadap PKI. Meskipun begitu Sukarno tetap menahan diri. Kabinet Sukiman menjadi paling terkenal dengan dilakukannya satu-satunya usaha yang serius pada masa itu untuk menumpas PKI. Kaum PKI menjadi komunis menjadi marah dengan bersedianya PNI bergabung dalam suatu koalisi dengan Masyumi, karena strategi mereka sangat tergantung pada kedua partai itu masih terus bertikai satu sama lain (Ricklefs, 2005: 365).

Selanjutnya pada kabinet Wilopo perdebatan antara Sukarno dengan Masyumi menyangkut masalah ideologi atau dasar negara Indonesia. Sukarno pernah berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan tanggal 27 Januari 1953. Pada kesempatan itu pula ia berpidato tentang keinginan negara nasional dan bukan negara berdasarkan Islam. Pernyataan Sukarno itu mendapat tanggapan berbagai kalangan, khususnya tokoh-tokoh Masyumi.

Para tokoh Masyumi M. Natsir dan Sukiman tidak memberikan tanggapan tegas. Natsir berpendapat bahwa munculnya perbedaan itu sebagai akibat dari kekacauan dalam memahami istilah, seperti Ideologi Islam atau negara nasional. Natsir meminta agar masalah ini cukup di bahas di internal kalangan muslim, dan tidak usah dibicarakan di muka umum.

Keterlibatan PKI sejauh ini belum terlalu memiliki pengaruh yang besar. Karena saat itu sedang memanasnya hubungan Sukarno dengan Partai Masyumi. Setelah kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden Ali I. Kabinet Ali I mulai menjalankan pemerintahan pada tanggal 12 Maret 1953. Pada masa inilah untuk pertama kalinya Masyumi tidak duduk dalam kabinet, sehingga menempatkan Masyumi dalam partai oposisi. Selanjutnya Meskipun dalam pemerintahan yang di pimpin oleh kabinet Boerhanudin Harahap (1955-1956) dan Kabinet Ali II (1956-1957) tetap tidak menunjukkan periode yang efektif dalam menjalankan masa tugasnya dan bahkan membuat persoalan semakin meruncing.

Masa permulaan Demokrasi dipimpin tahun 1957 mencatat Masyumi bukan saja tambah renggang dan asing dari Sukarno melainkan juga tambah bertentangan secara konfrontatif dengan Presiden. Dengan Natsir sebagai umum partai, garis kebijaksanaan politik Masyumi terhadap Sukarno tambah keras (Noer, 2000: 395). Pada tanggal 21 Februari 1957 Sukarno membongkar kabut rahasia tersebut. Dia mengusulkan bahwa "Demokrasi Terpimpin"-nya yang baru akan merupakan suatu bentuk pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional. Pemerintahan itu akan didasarkan pada Kabinet "gotong

royong" yang terdiri dari partai-partai besar, termasuk PKI, yang akan mendapat nasihat-nasihat dari Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional (pemuda, kaum buruh, kaum tani, kelompok agama, kelompok daerah dan lain-lain. Bukannya partai politik (Ricklefs, 2005: 385).

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dimulai sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekrit tersebut semakin memperkuat dan memperbesar kekuasaan Sukarno di satu pihak, sementara di pihak lain semakin melemahkan posisi dan peran Masyumi sebagai partai politik. Bukan hanya peran politik Masyumi semakin merosot, tetapi eksistensi Partai Masyumi pun diakhiri Sukarno melalui Keputusan Presiden Sukarno NO.200 tahun 1960. Pandangan Sukarno yang menunjukkan anti multi partai bisa dilihat dari tulisannya dalam Mencapai Indonesia Merdeka (1933). Sukarno mengatakan partai itu cukup satu, tidak dua atau tiga, karena kalau lebih dari satu maka akan membingungkan massa. Partai tunggal itu adalah partai pelopor. Partai Pelopor hanya mengenal satu fikiran dan isme

Partai Masyumi menghadapi Keputusan Presiden No.200 tahun 1960 dengan dua cara. Pertama, Pimpinan Partai Masyumi menyatakan Masyumi bubar, melalui suratnya No. 1801 BNI-25/60 tanggal 13 September 1960. Partai Masyumi membubarkan diri untuk menghindari cap sebagai partai terlarang, dan korban yang tidak perlu, baik terhadap anggota Masyumi dan keluarganya, maupun aset-aset Masyumi. Kedua, menggugat Sukarno di pengadilan. Usaha Masyumi mencari keadilan di pengadilan menemui jalan buntu. Kebuntuan itu terjadi karena adanya intervensi Sukarno terhadap pengadilan.

KESIMPULAN

Dengan demikian dalam sejarah politik kepartaian di Indonesia tersingkirnya Partai Masyumi dalam panggung politik Indonesia melalui keputusan Presiden No. 200/1960, menandai pula berakhirnya perjuangan partai Islam modernis oleh kelompok nasionalis sekuler dan komunis atas landasan kekuasaan otoriter. Konflik Ideologi yang terus berkepanjangan antara kedua kelompok tersebut dan didukung oleh penguasa menyebabkan Masyumi harus tersingkir dari arena politik dari pada dicap sebagai partai terlarang. Masyumi mengalami persimpangan politik sekitar tahun awal kemerdekaan 1945-1950 dan 1950-1960. Walaupun demikian, Masyumi telah meninggalkan jejak etik demokratis dalam sejarah kepartaian di Indonesia, akan tetap dicatat sebagai modal untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan bertanggungjawab pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Darban, Ahmad Adaby, *Peran Serta Islam dalam Perjuangan di Indonesia*. Yogyakarta : UII. 1989.
- [2] Deliar Noer.2000. *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1960*. Bandung : Penerbit Mizan.
- [3] Douglas E. Ramage, *Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance*, London, Routledge, 1995.
- [4] Ghazali, Adeng Muchtar. *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*.Cet. 1.Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- [5] Kahin, George M.C Turnan. 1995. *Nasionalisme Dan Revolusi Di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- [6] Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masyarakat Kenegaraan*.Jakarta : LP3ES, 1985.
- [7] Siregar, Insan Fahmi. 2014. *Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Semarang : Widya Karya Semarang.
- [8] Suryanegara, Mansyur Ahmad.2010. *Api Sejarah 2*. Bandung : Penerbit Salamadhani
- [9] Ricklefs, M.C.1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.